DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Studi Kasus Masyarakat Sekitar Hutan Lindung di Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

SKRIPSI

Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Oleh

AGUSTIA MONRA
BP. 03191010

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 17-11-09
NOMOR BI: 2090902688

ABSTRAK

AGUSTIA MONRA, 03191010. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung" (Studi Kasus: Masyarakat Sekitar Hutan Lindung di Kenagarian Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)". Pembimbing I Dr. Azwar, M.Si dan pembimbing II Drs. Alfitri, MS.

Apabila kita berdiskusi tentang partisipasi masyarakat, maka kita akan bicara tentang partisipasi seorang individu dalam kelompok sosialnya. Dalam pengelolaan hutan, salah satu dari tiga stakeholder yang sangat berperan penting adalah masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Oleh karena itu, sebuah penelitian tentang partisipasi masyarakat untuk saat ini merupakan salah satu keharusan. Khususnya, masalah dunia tentang isu pemanasan global yang berhubungan dengan pertisipasi masyarakat. Oleh karena itu manfaat penelitian ini diharapkan berguna secara akademis untuk menambah pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Secara praktis dijadikan sebagai masukan bagi instansi yang terkait dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara mendalam, dengan menggunakan *purpossive sampling* dalam menentukan informan. Penentuan jumlah informan ditentukan oleh analisis data dengan prinsip triangulasi. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dilapangan yang disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.

Hasil temuan data menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung masih termasuk rendah terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Dari hasil penelitian, juga dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung di Kenagarin Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh faktor kebutuhan hidup, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor sosial budaya, kurangnya sosialisasi dan informasi dan Keterbatasan Lahan. Dalam penelitian ini juga ditemukan kurangnya pengelolaan dari pemerintah sebagai pengambil keputusan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai hak atas kualitas lingkungan yang baik dan sehat termasuk generasi yang akan datang. Oleh sebab itu segala kebijakan dalam proses pembangunan harus menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia.[1] Hal ini sesuai dengan salah satu indikator pembangunan yang berhasil yakni terdapatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan dalam artian tidak terjadi kerusakan sosial dan kerusakan alam.[2]

Pembangunan hutan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diartikan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya. Hutan tidak hanya bernilai secara ekonomis tetapi didalamnya juga terkandung nilai ekologis dan sosial budaya. Disamping itu, hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai harganya sehingga hak – hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam perlindungan hutan yang terdiri atas perlindungan terhadap hutan itu sendiri, perlindungan terhadap kawasan hutan, perlindungan terhadap hasil hutan dan perlindungan dalam investasi. Dalam era

[1] Emil Salim, "Pembangunan Berkelanjutan, Keperluan Penerapannya di Indonesia" dalam SERASI 24, 1992

[2] Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta, 1995)h.8

otonomi daerah, pemerintah pusat telah mendistribusikan sebagian wewenangnya dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan kepada pemerintah daerah yang juga merupakan usaha memposisikan komunitas daerah sebagai pengelola sumber daya hutan berdasarkan latar belakang sosial budaya masyarakat adat setempat. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan dari daerah untuk melaksanakan otonomi tersebut demi mencapai kesejahteraan rakyat dalam konteks perlindungan hutan.

Terkait dengan usaha pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan ini, di Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat terdapat kawasan hutan seluas 388.777 hektar dengan perincian 111.210 hektar hutan lindung (HL), 3.540 hektar hutan produksi terbatas (HPT), 19.988 hektar hutan produksi (HP), 45 hektar suaka alam dan wisata (HSA) dan 253.994 hektar areal penggunaan lain (APL). Dari luas hutan tersebut, seluas 8.940 hektar berada di Kecamatan Ranah Batahan atau 20,8 % dari luas Kecamatan merupakan areal hutan lindung.[3]

Hutan lindung sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan bertujuan untuk pengaturan air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Surat keputusan menteri kehutanan tanggal 12 November 1988 No.903/Menhut-II/1988 menjelaskan bahwa fungsi hutan lindung antara lain : (1) Hutan lindung dapat dimanfaatkan dan juga untuk kegiatan wisata alam dengan persyaratan tertentu. (2) Memberikan izin kepada rakyat untuk memungut rotan, umbi – umbian dan hasi hutan non kayu lainnya, asalkan dijaga dan diawasi agar tidak merusak dan

[3] Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Dalam menjalankan kebijakan atau program yang menyangkut dengan masyarakat tentu juga harus terlebih dahulu mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi tersebut. Demikian juga dengan kebijakan yang berhubungan dengan kehutanan khususnya pengelolaan hutan lindung.

Dalam kasus pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dari penelitian didapat kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat sekitar hutan lindung dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Pasaman Barat masih tergolong kurang terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Rendahnya Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kecamatan Ranah Batahan sebabkan oleh Faktor Kebutuhan Hidup, Faktor Ekonomi, Faktor Kelembagaan yang kurang berfungsi dengan baik, Faktor Sosial Budaya, kurangnya sosialisasi dan informasi dan Keterbatasan Lahan.
3. Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan belum semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan – kepentingan yang berkembang di

dalam masyarakat terkait dengan keberadaan hutan lindung di daerah mereka.

4. Belum ditemukannya konsensus yang mengatur perbedaan pandangan antara masyarakat sebagai komunitas adat dengan pemerintah sebagai penguasa.

4.2. Saran

Diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat menjadi partisipasi yang bersifat mandiri dalam artian masyarakat berperan serta dalam program pengelolaan hutan lindung didasarkan pada inisiatif sendiri tanpa tergantung dengan pihak lain.

Untuk itu langkah-langkah yang disarankan adalah :

1. Menggali dan mengembangkan bentuk – bentuk perekonomian masyarakat berbasis hutan (produk dan jasa), tidak terkecuali memikirkan sistem pengolahan pasca panen dan pemasaran yang dimilikinya.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan lembaga–lembaga perekonomian lokal yang sesuai dengan sosial-budaya setempat.
3. Bersama–sama mendiskusikan dan mencari jalan keluar segala permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan termasuk bagaimana mengatur kepentingan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. "Handout Metode Penelitian Kualitatif II". Padang: Sosiologi FISIP Unand,Padang,2005

Anonim, Laporan Tahunan Hasil Penelitian Tahun 2003 Buku II Badan Litbang Kehutanan Departemen Kahutanan, Jakarta. Hal. 117-123.

Bakhdal Kasim dan Darmawan Aji, "Problematika Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung di Pasaman," Padang 20 September 2006.

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga.* Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Didik *at.al.*, Kehutanan Masyarakat dan Karakteristiknya. (Warta FKKM. Vol.1 No.6 Fahutan UGM, Yogyakarta, 1998).

Ife, Jim & Frank Toseriero. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyaakat di Era Globalisasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajara,2008

Indraddin, "Faktor- Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi anggota Kopma Unand," Skripsi Sarjana pada FISIP Unand,1994.

Lustiadi, Yadi. "Analisis Model Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Era Globalisasi" RISTEH Jurnal Ilmu Sosial Teknologi dan Hukum Universitas Bandar Lampung, Juli 2001.

Konyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar.* Yogyakrta : UGM Press, 1991

Maleong. Lexy J.,*Metodologi Peneltiian Kualitatif.* Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007.

Nanang, Martinus dan G. Simon Devung (*ed*). *Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan.* IGES, 2004.

Pasaribu, *dkk*., *Sosiologi Pembangunan.* Bandung : Rosdakarya, 1982.

Peter Hagul (*ed*). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.* Rajawali Pres, Jakarta,1992.

Purwatiningsih, Annisa. Prof.Drs. Ismani HP., MA, Drs. Irwan Noor, MA."Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian dalam Kebijakan Program